

2012

Koalisi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan
dan Demokrasi



[LAPORAN TAHUNAN]

MEMPERKUAT PERAN DAN POSISI
PEREMPUAN UNTUK MEMPERCEPAT
TERWUJUDNYA KEADILAN, DEMOKRASI DAN
PERDAMAIAN

LAPORAN TAHUNAN

MEMPERKUAT PERAN DAN POSISI PEREMPUAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KEADILAN, DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN

Januari –Desember 2012

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Jl. Siaga 1 No.2B, Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan -12510
Telp: (021) 79183221, 79183444, Fax : (021) 79183444
Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id
Website: www.koalisiperempuan.or.id

DAFTAR ISI

NO	BAB	HALAMAN
1	BAB 1 ANALISIS SITUASI	
1	Analisis Situasi Daerah	
2	Analisis Situasi Nasional	
3	Analisis Situasi Internasional	
2	BAB II RESPON KOALISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP SITUASI	
1	Pola Respon Terhadap Situasi	
2	Refleksi Terhadap Strategi Merespon Situasi	
3	BAB III PELAKSANAAN PROGRAM & CAPAIAN	
1	Pelaksanaan Program	
2	Capaian Program	
3	Pembelajaran	
4	BAB IV TANTANGAN KE DEPAN 2013	
1	Momentum & Peluang	
2	Kekuatan dan Kelemahan Organisasi	

KATA PENGANTAR

Karakter dan visi gerakan perempuan di Indonesia yang transformatif dan bercita –cita mewujudkan keadilan, demokrasi, kesejahteraan dan perdamaian dihadapkan pada ujian di tahun 2012 ini. Hal ini terjadi, karena sejumlah kebijakan publik yang akan menentukan arah politik dan pembangunan di tentukan di tahun 2012 ini. Antara lain adalah Undang-Undang Paket Politik, UU Pangan dan UU Penanganan Konflik sosial serta sejumlah undang-undang lainnya

Disisi lain, gerakan penguatan masyarakat, utamanya kelompok perempuan dan kaum terpinggirkan lainnya, semakin surut. Jumlah organisasi yang melakukan penguatan di tingkat masyarakat dari waktu ke waktu semakin berkurang.

Sementara itu, gerakan Politik Identitas, semakin hari semakin aktif dan menjangkau sampai ke tingkat masyarakat di tingkat akar rumput, dan menyulut konflik di berbagai daerah. Melihat geraknya dari waktu ke waktu, sangat mungkin politik Indentitas akan terus tumbuh dan menjadi duri dalam daging.

Untuk itulah, sepanjang tahun 2012 ini Koalisi Perempuan Indonesia bekerja di dua aras penting untuk perubahan, yaitu Advokasi untuk Reformasi Kebijakan Publik yang adil gender dan Penguatan anggota dan organisasi sebagai upaya penguatan masyarakat. Dua strategi ini dipilih untuk tujuan, meningkatkan penikmatan Hak-hak Perempuan dan mewujudkan kesejahteraan melalui tata pemerintahan dan pergaulan masyarakat yang demokratis, adil dan beradab.

Dua strategi ini dapat berjalan dengan baik karena komitmen seluruh pengurus dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dan sistem dukungan kelembagaan, manajemen informasi, tata kelola keuangan dan aset organisasi yang memadai.

Laporan Tahunan ini, menggambarkan kerja sama antara pengurus di tingkat nasional, wilayah, Cabang dan Balai Perempuan serta seluruh staff dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

Jakarta Februari 2013

Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal

BAB I

ANALISIS SITUASI

1. Analisis Situasi Daerah

Situasi Penting yang menjadi perhatian Koalisi Perempuan Indonesia selama tahun 2012 adalah : 1) Kemiskinan Perempuan, 2) Pemilihan Kepala Daerah dan Pelayanan Publik , 3) Korupsi di Daerah, 4) Konflik social dan 5) Peraturan Daerah yang membatasi perempuan.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2012 adalah **28 594,64** orang atau sekitar 11,66% sejumlah 18. 086,87 orang (**63, 25%**) **Penduduk Miskin** Di Indonesia, tinggal di **Pedesaan** dan 10 507,77 orang (46,75%) tinggal di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan tetap tinggi. Kesenjangan antara desa dan perkotaan semakin menajam. Realita lain yang perlu menjadi perhatian adalah : meningkatnya jumlah penduduk miskin bunuh diri. Tahun 2011 dilaporkan kasus bunuh diri hanya 147 orang, sedangkan tahun 2012 menajai 167 orang. Sebagian besar pelaku bunuh diri adalah ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Aksi bunuh diri Ibu Rumah Tangga kerap kali dilakukan dengan melibatkan anak-anak balitanya. Problem utama penghapusan kemiskinan, yang tidak menunjukkan hasil signifikan adalah ketidakakuratan data. Data kemiskinan hanya mencatat mereka yang tergolong sebagai kelompok yang mengalami kemiskinan akut. Namun BPS tidak memiliki data konkrit tentang kelompok miskin yang rentan jatuh dalam katagori miskin akut.

Pemilihan Kepala Daerah, menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk masuk dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif. Jumlah perempuan sebagai kepala daerah, walikota/Bupati meningkat dari 5 perempuan kepala daerah menjadi 13 perempuan kepala daerah. Disamping itu, terdapat 10 perempuan sebagai wakil bupati/walikota. Kepala Daerah perempuan terbukti memiliki perhatian serius terhadap isu-isu yang berkaitan erat dengan kehidupan perempuan dan anak. Program-program terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, seperti peningkatan

layanan kesehatan untuk ibu dan bayi, akses terhadap air bersih, sanitasi dasar, penanganan gizi buruk, pendidikan dasar, peningkatan ekonomi perempuan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Namun jika dilihat dari sudut makro, dari seluruh desa di Indonesia yang mencapai **79.075** desa, hingga kini sekitar ada 60 % dari jumlah desa yang ada belum memiliki akses terhadap air minum yang layak. Hanya 88% Desa yang sudah menikmati listrik, dan hanya sekitar 45% dari jumlah desa yang memiliki sanitasi dasar yang memenuhi standard kesehatan. Disamping itu, gagasan adanya satu bidan desa untuk setiap satu desa, hingga kini belum terwujud sepenuhnya.

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah terus terungkap. Kementrian Dalam Negeri melaporkan, bahwa sampai dengan tahun 2012 terdapat 173 Bupati/wali kota yang tersangkut kasus korupsi. Jumlah itu mencapai sepertiga dari jumlah kepala daerah yang ada di Indonesia yang berjumlah 540 kabupaten/kota. Disamping itu, dari 33 Gubernur di Indonesia terdapat 17 gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Hasil pendidikan anti Korupsi yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di 27 Desa menunjukkan bahwa. praktek korupsi juga dilakukan oleh Kepala Satuan Pemerintahan Daerah (SKPD) , petugas layanan publik, bahkan dilakukan oleh pejabat /petugas layanan masyarakat di tingkat desa. Hasil analisis Koalisi Perempuan Indonesia, menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok paling rentan menjadi korban dari praktek korupsi, terutama dalam bentuk pemotongan hak dan pungutan liar. Perempuan-khususnya yang hidup di pedesaan dan kekurangan akses informasi, memiliki sikap permisif terhadap praktek korupsi yang menimpa dirinya karena ketidak tahuan mereka.

Hampir di seluruh wilayah di Indonesia memiliki daerah-daerah yang berpotensi tinggi untuk tersulut konflik. Konflik yang paling berpotensi meluas antara lain adalah konflik berbasis agama atau keyakinan dan konflik berbasis etnis. Perempuan menjadi korban paling menderita dalam situasi konflik, Karena umumnya pihak-pihak yang berkonflik menyerang perempuan sebagai target untuk melemahkan pertahanan lawan konfliknya.

Dalam situasi konflik, perempuan juga menjadi rentan menjadi korban kekerasan seksual dan perdagangan perempuan dan anak perempuan.

Sejumlah daerah masih berlanjut mengemukakan rancangan peraturan daerah yang membatasi perempuan. Di beberapa kabupaten/kota di Gorontalo, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi sedang membahas peraturan daerah tentang larangan keluar malam bagi perempuan. Sedangkan di Aceh dimunculkan wacana oleh Walikota Lhokseumawe Aceh akan menerbitkan larangan bagi perempuan untuk membonceng dengan duduk mengangkang. Koalisi Perempuan Indonesia di daerah-daerah tersebut aktif menolak diterbitkannya peraturan yang membatasi perempuan.

2. Analisis Situasi Nasional

Situasi yang paling mengemuka di tingkat nasional adalah isu korupsi bermotif politik, kegaduhan politik menjelang persiapan pemilihan umum dan kecenderungan pemerintah untuk kontrol terhadap masyarakat sipil, meningkatnya jumlah HIV, Perlindungan sosial, Kebencanaan dan kekerasan terhadap perempuan oleh pejabat public

Sepanjang tahun 2012, isu korupsi melambung menjadi topik utama media massa. Isu korupsi ini terutama berkaitan dengan pejabat partai politik, anggota DPR dan pejabat kementerian tertentu. Isu korupsi yang menguat ini mengesampingkan semua isu penting yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Sejumlah anggota dewan dan pejabat kementerian perempuan turut tersangkut kasus korupsi. Menguatnya isu korupsi ini dikhawatirkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan sejumlah organisasi perempuan akan menjadi rintangan untuk mengkampanyekan pentingnya peningkatan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan. Karena bukti telah menunjukkan, bahwa perempuan di posisi penting, ternyata juga tidak bebas dari praktek korupsi.

Kegaduhan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terutama terkait dengan Jaminan Keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, Judicial Review Undang-undang Pemilu, Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, serta pembentukan komisioner Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait isu ini, Koalisi Perempuan Indonesia mengambil posisi untuk

melakukan: 1) advokasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam UU Pemilu, 2) melakukan upaya lobby dan kampanye untuk keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, 3) Lobby kepada KPU untuk Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar calon Legislatif dan dalam lembaga KPUD melalui Peraturan KPU, 4) menyiapkan sejumlah materi pendidikan dan kampanye untuk peningkatan keterwakilan perempuan. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia ikut terlibat dalam jejaring individu dan organisasi untuk melakukan Judicial Review.

Kecenderungan Kontrol pemerintah (dan DPR) terhadap masyarakat sipil diwujudkan dalam bentuk pembahasan RUU Ormas. Rancangan undang-undang ini mewajibkan semua organisasi mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar pada kementerian Dalam negeri atau pemerintah Daerah. RUU tersebut juga memberi kewenangan pemerintah untuk: 1) memantau program organisasi, 2) Keuangan organisasi. 3) mencabut izin dan membubarkan organisasi masyarakat sipil. Koalisi Perempuan Indonesia termasuk dalam kelompok yang menolak disahkannya RUU tersebut. Hingga akhir tahun 2012, RUU Ormas ditunda pengesahannya karena tekanan dari masyarakat sipil.

Isu lain yang menguat adalah meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan AIDs oleh suaminya. Jumlah perempuan ibu rumah tangga yang terinfeksi meningkat beberapa kali dari jumlah sebelumnya. Koalisi Perempuan Indonesia mengintroduksi ide untuk mempertimbangkan pendekatan hukum. Namun ide ini menimbulkan kepanikan dikalangan ODHA karena kekhawatiran mereka mengalami kriminalisasi.

Perhatian serius juga diberikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia terkait dengan akses, partisipasi dan kontrol perempuan terhadap program perlindungan sosial. Kajian kebijakan yang dilakukan oleh kolaisi perempuan Indonesia menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki cukup akses dan tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan penelitian tentang program perlindungan sosial di 3 wilayah Koalisi Perempuan.

Persoalan nasional yang hingga kini belum teratasi dengan baik adalah masalah penanganan bencana terutama menyangkut deteksi dini terhadap bencana, Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana, dan koordinasi dalam penanganan bencana, baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antara pemerintah dengan elemen lain yang berpartisipasi dalam penanganan bencana. Perhatian khusus terhadap perempuan, anak, penyandang cacat dan lanjut usia yang merupakan kelompok rentan belum dibakukan dalam peraturan pelaksana. Pemerintah dan Badan penanggulangan Bencana sedang merancang peraturan pelaksana. Kesempatan ini digunakan oleh Koalisi Perempuan dan jaringan perempuan peduli bencana untuk memasukkan perspektif keadilan gender.

Sepanjang tahun 2012 juga diwarnai oleh tindakan dan pernyataan pejabat publik yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dan pencitraan negatif terhadap perempuan. Terhadap situasi ini Koalisi perempuan menyampaikan pernyataan tertulis maupun lisan merespon tindakan yang melanggar etika kepemimpinan tersebut.

3. Analisis Situasi Internasional

Sepanjang tahun 2012 beberapa momentum penting terjadi di tingkat internasional maupun regional terjadi. Ditingkat ASEAN, momentum penting yang terjadi adalah pembahasan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Agenda Komisi Perempuan dan Anak ASEAN dan pemilihan representative Komisi HAM ASEAN . Dalam pembahasan Deklarasi HAM ASEAN dan Agenda Komisi Perempuan dan Anak ASEAN, bersama dengan organisasi di tingkat Asia Pasifik, APWLD (Asian Pacific Koalisi Perempuan Indonesia mendorong masuknya jaminan perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak, Pentingnya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga pengambilan keputusan di negara-negara di ASEAN.

Disamping itu, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OCHR) tengah menyelenggarakan Universal Periodic Review (UPR) yaitu kajian periodic kemajuan pelaksanaan HAM di negara-negara anggota PBB. Review atau kajian pelaksanaan HAM ini dilakukan setiap empat tahun sekali. Salah satu negara yang ada dalam schedule petinjauan kemajuan pelaksanaan HAM

adalah Indonesia, yang dilaksanakan pada Mei 2012. Bertepatan dengan moment tersebut Koalisi Perempuan Indonesia bersama lima organisasi (Kapal Perempuan, Ikatan Perempuan Positif Indonesia –IPPI, Yayasan Pemantau Hak Anak-YPHA, Bina Desa dan Asian Muslim Network –AMAN) menyampaikan laporan UPR khusus untuk issue Perempuan dan Anak.

Moment strategis lainnya, adalah review yang dilakukan oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Committee) tengah melakukan kajian tentang kemajuan penerapan Convention on Elimination all form Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1984. Terkait dengan kajian pelaksanaan CEDAW ini Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan laporan tertulis kepada Komite CEDAW khususnya untuk pelaksanaan Pasal 14 CEDAW yaitu pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pedesaan. Disamping itu, Koalisi Perempuan juga mendukung CEDAW Working Group Initiative (CWGI) untuk menuliskan laporan CEDAW Pasal 1-5 dan Pasal 6 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak serta Pasal 7 tentang Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan kehidupan di Area Publik.

Situasi lain yang cukup penting adalah hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio + 20 Tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Janeiro Brazil . Dalam Pertemuan ini disepakati bahwa setelah berakhirnya Agenda Pembangunan Global untuk Mengurangi Kemiskinan di dunia, Millennium Development Goals pada tahun 2015 nanti, perlu disepakati agenda pembangunan baru yang merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari MDG. Pemimpin negara 2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengusulkan nama dari Agenda pembangunan tersebut : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals- SDG). Selain itu KTT Rio + 20 juga menyepakati dokumen The Future We Want yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Agenda Pembangunan Paska MDG 2015.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan KTT +20, maka disusunlah tim perumus agenda pembangunan paska MDG 2015 yang disebut High Level Panel Eminent Persons (HLPEP) dimana Presiden Indonesia, Susilo Bambang

Yudoyono (SBY) beserta Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia menjadi wakil pimpinan (Co –Chair) dari panel tersebut, yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Kim Moon. Panel ini menyepakati bahwa proses penyusunan dokumen Agenda Pembangunan Paska MDG 2015 harus dilakukan melalui proses konsultasi yang partisipatif, melibatkan semua elemen , termasuk partisipasi masyarakat sipil dan kaum termarginal serta pimpinan kepala negara dan pimpinan kepala negara, agar semua pihak memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya.

Mengingat pengaruh dari kesepakatan Internasional terhadap kebijakan dan alokasi anggaran di tingkat nasional dan daerah, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan, maka Koalisi Perempuan Indonesia ikut terlibat dalam proses penyusunan Visi, Prinsip dan Agenda serta Indikator Pembangunan Paska 2015 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG*) .

BAB II

RESPON KOALISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP SITUASI

1. Pola Respon Terhadap Situasi

Respon yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam menghadapi situasi di tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan secara programatik dan pendekatan secara reaktif yaitu respon terhadap situasi aktual.

Pendekatan secara programatik dilakukan sesuai dengan struktur dalam sekretariat nasional yang terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) dan divisi serta dirancang sesuai dengan siklus perencanaan program.

Sedangkan respon secara reaktif dilakukan dalam bentuk tindakan cepat seperti penyampaian pernyataan ke Publik dalam bentuk lisan maupun tertulis, aksi Tanggap terhadap bencana dan perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu tertentu (*Crash Program*)

Pendekatan secara programatik, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Kerja (work plan) tahun 2012 yang disahkan dalam Rapat kerja Nasional. Yaitu Reformasi Kebijakan Publik meliputi kajian kebijakan, penyusunan dokumen advokasi dan intervensi proses pembahasan kebijakan melalui lobby dan kampanye dan Penguatan Anggota dan Organisasi yang meliputi pengorganisasian, pendidikan kader dan Mekanisme Organisasi (Rembug Balai, Konferensi Cabang, dan Kongres Wilayah) yang dilakukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Aceh, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Tarakan, Samarinda, Kutai Karta Negara, melalui Program Pendidikan Anti Korupsi (didukung oleh *United Nation Office on Drug and Crime UNODC*), Program Peningkatan Keterwakilan Perempuan (didukung oleh USAID melalui Partnership –*IKAT-US Power*), Program Penelitian dan Penguatan Akses Perempuan Terhadap Perlindungan Sosian dan Pengurangan Kemiskinan (didukung oleh AUSAID-MAMPU) dan

Program Penguatan Organisasi (di dukung oleh *Access, Oxfam Indonesia/Australia, The Asia Foundation –TAF, dan Development and Peace*)

Sedangkan kegiatan yang merupakan Respon terhadap situasi aktual adalah Penyampaian Pernyataan (Statement) Kepada Publik, terhadap situasi terkini, penyelenggaraan seminar dan Konsultasi Publik terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) dan tanggap terhadap bencana,

2. Refleksi Terhadap Strategi Merespon Situasi

Respon secara programatik maupun respon isu aktual dihadapkan pada persoalan pemerataan dan keserentakan. Persoalan Pemerataan terutama menyangkut keterjangkauan program yang tidak dapat meliputi semua wilayah, cabang dan Balai Perempuan. Serta terkait dengan ketersediaan dana dan alokasi dana yang tersedia terutama disebabkan oleh perbedaan standard dari pihak pemberi dukungan. Hanya sejumlah wilayah, cabang dan Balai Perempuan yang terkena program. Situasi ini mengakibatkan kesulitan bagi pengurus dan staff baik di tingkat nasional, wilayah maupun cabang untuk mengelola organisasi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan serta menjelaskan keterbatasan yang dialami kepada Pengurus Balai Perempuan, Cabang maupun wilayah. pendanaan.

Sedangkan persoalan keserentakan program terutama terkait dengan tahapan dan waktu penyelenggaraan program yang dihadapkan pada jarak lokasi program, ketersediaan sumber daya manusia. Persoalan pemerataan dan keserentakan pelaksanaan program ini berakibat pada capaian dan program serta perkembangan organisasi.

Sedangkan respon situasi aktual yang tidak dihadapkan pada masalah adalah respon dalam bentuk penyampaian statement, sedangkan respon terhadap bencana dan crash program dihadapkan pada persoalan ketersediaan dana, terutama di sekretariat nasional. Keterbatasan dana di sekretariat terutama disebabkan oleh alokasi dana diperoleh sepanjang tahun 2012, dan ketidakseimbangan komposisi distribusi dana, yaitu untuk sekretariat nasional 10% dan wilayah 90% yang berakibat pada kurangnya keleuasaan dalam merespon isu dan beban kerja berlebih di tingkat sekretariat nasional

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM & CAPAIAN

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Pelaksanaan Program Reformasi Kebijakan Publik

A. Kajian dan Intervensi Kebijakan

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kajian dan Intervensi terhadap proses pembahasan di DPR Rancangan Undang-undang (RUU) : Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesenjangan dan Keadilan Gender, RUU Penanganan Konflik Sosial. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan intervensi dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang disusun untuk mengubah (amandemen) undang-undang yang telah ada. RUU Amandemen tersebut adalah RUU Amandemen Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Amandemen UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, RUU Desa (sebelumnya menjadi bagian dari UU Pemerintahan Daerah) dan RUU Pemilu (amandemen dari UU No 10 Tahun 2008).

Intervensi terhadap proses pembahasan RUU dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk memasukkan perspektif keadilan gender dalam RUU tersebut, seperti tentang kesamaan akses dan kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, perlindungan khusus bagi perempuan dan anak, serta Tindakan khusus sementara untuk mencapai persamaan kesempatan.

Intervensi dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam bentuk penyampaian kertas posisi, dan matrik persandingan antara RUU dan

usulan Koalisi Perempuan Indonesia dan dialog secara formal dan informal dengan tim perumus RUU.

B. Studi (field & Literature) untuk data Advokasi

Studi Literatur dan laporan needs assessment dilakukan untuk penyusunan laporan terkait implementasi konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu penyusunan laporan berkala CEDAW, CAT, ICCPR, IECSPP, CRC, CERD, UPR, MDG's.

Penyusunan Laporan Masyarakat Sipil tentang Pelaksanaan CEDAW Ps 6, 7 dan 8 disusun bersama CWGI (CEDAW Working Group Initiative) sedangkan Laporan CEDAW khusus pasal 14 tentang Perempuan Pedesaan disampaikan langsung oleh Koalisi Perempuan kepada Komite CEDAW.

Pengajuan Listing Questioner (berdasarkan perkembangan situasi) untuk penyusunan laporan CERD (Konvensi anti diskriminasi Rasial), dan Penyusunan draft Complaint Submission kepada Committee Status of Women dilakukan sebagai bagian dari kerja jaringan bersama Imparsial, Elsam, Kontra dan Human Right Working Group (HRWG).

Disamping itu Koalisi Perempuan Indonesia juga berpartisipasi dalam Penyusunan masukan perspektif gender dalam laporan inisiasi ICCPR untuk Tahun 2013 bersama INFID dan HRWG

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, dan kebencanaan, Koalisi Perempuan Indonesia mengkaji kebijakan, teori dan praktek lapangan tentang : Perempuan dan Sumber Daya Alam dalam Perspektif CEDAW, BPFA dan Human Security, Hak Atas Tanah Bagi Perempuan Transmigran dan Perempuan Pedesaan Hak Atas Tanah dan air bersih bagi Perempuan dan Pemenuhan Human Security

Selain itu Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan monitoring dan kajian tentang proses Legislasi nasional dan daerah terkait Kebijakan pemerintah pusat Peraturan Daerah, dan keputusan Gubernur terkait Anti

Ahmadiyah. Hasil studi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan terhadap Peraturan Gubernur yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah.

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kajian Literatur dan identifikasi praktek-praktek dilapangan tentang Kekerasan berbasis gender dan praktek-praktek yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan terutama terkait dengan : Kekerasan Terhadap Perempuan Penganut Ahmadiyah, Perkawinan Anak, Sunat Perempuan dan dampaknya bagi Perempuan, akar masalah dan akibat dari tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam pembahasan Gender dan Reformasi Sektor Keamanan, Koalisi Perempuan Indonesia fokus pada Pentingnya mengintegrasikan Konsep Keamanan Manusia, Rekomendasi 1325 dalam strategi Umum Pertahanan Nasional dan Kajian Kritis terhadap RUU Penanganan Konflik Sosial (membahas judul dan substansi yang hanya focus pada dampak konflik sosial, tetapi mengabaikan upaya pencegahan dan penanggulangan)

C. Advokasi bersama Jejaring Kerja

Advokasi bersama jejaring dilakukan dengan terlibat dalam pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bersama JaLa PRT (Jaringan Kerja Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga, terdiri dari 20 organisasi.

Koalisi Perempuan Indonesia juga termasuk salah satu pemohon uji materi (*Judicial Riview*) terhadap Undang-Undang Pemilu. *Judicial Review* ini diikuti oleh 22 organisasi dan 18 tokoh perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan jaringan NGO (INFID, Kemitraan, FITRA, ICW, AMAN, WALHI, KRUHA, ASPPUK) membentuk Koalisi untuk melakukan advokasi terhadap upaya pembangunan paska MDG's pada Tahun 2015 nanti. Keterlibatan Koalisi Perempuan Indonesia dalam jaringan ini juga bertujuan agar tujuan pembangunan terutama upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan juga dapat merujuk pada keadilan gender.

D. Laporan Independen Masyarakat Sipil

Bersama dengan CEDAW Working Group Initiative (CWGI), menyusun laporan versi NGO untuk persiapan sidang Komite CEDAW 2012 di Genewa. Koalisi Perempuan Indonesia secara khusus menyusun laporan pasal tentang perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak (Pasal 6), serta pasal 7 dan 8 mengenai kehidupan politik dan publik dan keterwakilan perempuan di ranah Internasional.

Koalisi Perempuan Indonesia pada Tahun 2012 ini juga mengirimkan Laporan khusus Pasal 14 Konvensi CEDAW yaitu tentang Pemenuhan Hak Perempuan Pedesaan kepada sekretariat OCHCR dan Komite CEDAW pada Bulan Juni 2012. Laporan ini juga telah dibahas dalam CEDAW 52 th session di New York yang telah berlangsung selama 9-17 July 2012

E. Penyusunan Kertas Posisi, Fact sheet, Release

Selama tahun 2012 telah dihasilkan 4 Lembar Informasi (Factsheet) tentang: 1) informasi Mekanisme Musrenbang dan Kalender APBDEs, 2) kompilasi kebijakan tentang pemberantasan korupsi, 3) Pentingnya peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, 4) Pentingnya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga Penyelenggara Pemilu.

Factsheet tersebut merupakan materi pendukung pendidikan dan advokasi di Balai Perempuan, Cabang dan Provinsi.

Koalisi Perempuan telah menerbitkan 10 Pernyataan sikap yaitu :

1. Gugus Tugas Anti Pornografi, Tidak Perlu, Boros dan Latah, (Maret 2012)	6. Kedaulatan pangan tergantung pada komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan petani (Hari Tani, September 2012)
2. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi, Akhiri Diskriminasi Terhadap Anak (Maret 2012)	7. KPU harus umumkan hasil verifikasi parpol terkait keterwakilan 30 % perempuan (September 2012)
3. Kekerasan Berbasis Agama Berlanjut, Akibat Kelalaian Pemerintah Dalam	8. Perubahan peraturan KPU berpotensi untuk melemahkan

Perlindungan, Pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (Mei 2012)	komitmen keterwakilan perempuan di PARPOL (November 2012)
4. Negara Wajib Mempromosikan, Menghormati Dan Memenuhi Hak-Hak Buruh (Mei 2012)	9. Saatnya Menggunakan Pendekatan Hukum Terhadap Penyebar Virus HIV Dan Aids (menyambut hari AIDS Sedunia, Desember 2012)
5. Memerdekakan Perempuan (Statement 67 tahun kemerdekaan RI, Agustus 2012)	10. Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Bagi Perempuan Dan Kelompok Masyarakat Rentan Lainnya (menyambut hari pergerakan perempuan. Desember 2012)

F. Aksi Politik (Political Action)

Political action dilakukan dalam bentuk dialog kebijakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta lembaga setingkat kementerian.

Dialog kebijakan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yaitu : **1)** dengan DPD membahas tentang dukungan DPD untuk ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarnya dan amandemen UU No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Maret 2012), **2)** dengan TIM RUU Pemilu DPR membahas tentang usulan mempertahankan ketentuan jaminan keterwakilan perempuan dan Zipper system dalam penempatan perempuan dalam daftar anggota legislative, **3)** dengan Komisi II DPR RI untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Desa, **4)** Komisi 8 DPR RI membahas masukan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap RUU Kesenjangan Gender.

★★★★★★★★★★



★★★★★★★★★★

Dialog Kebijakan dengan pemerintah dilakukan dalam bentuk : 1) Audiensi dengan Kementerian Luar Negeri tentang penanganan TKI di Suriah (Juni 2012), 2) Audiensi dengan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan hukuman badan yang masih berlangsung di Indonesia, 3) Audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan masukan pentingnya harmonisasi kebijakan di tingkat daerah mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, trafiking, dan eksploitasi seksual komersil.

Sedangkan dialog kebijakan dengan lembaga independen negara dilakukan dalam bentuk dialog dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Koalisi Perempuan Indonesia terlibat dalam Diskusi Pakar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tentang pentingnya menginisiasi pendidikan anti Korupsi berbasis keluarga untuk mengembangkan budaya anti korupsi sejak dini.

Dialog Kebijakan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas tentang Peraturan KPU untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam daftar calon dan lembaga penyelenggara pemilu. Dialog kebijakan ini dilakukan sebanyak 4 kali, dimana Koalisi Perempuan Indonesia memfasilitasi dialog antara : a) KPU dengan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, b) KPU dengan Jaringan Perempuan dan Politik, c) KPU dengan Pemimpin Perempuan Timor Leste dan d) KPU dengan PD Politik

Dialog kebijakan dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dilakukan untuk membahas temuan sementara hasil riset Koalisi Perempuan Indonesia di 3 Provinsi (Bengkulu, Jambi dan Jawa Timur) tentang Akses Perempuan terhadap Program Perlindungan Sosial dan pengurangan kemiskinan. Dialog dengan UKP4 dilakukan terkait dengan peran masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap agenda pembangunan Paska MDG 2015.

G. Kampanye dan Respon isu aktual

Untuk merespon situasi aktual, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan Semiloka (seminar dan Lokakarya), Lokakarya Diskusi Pakar dan simposium Nasional . **Semiloka “Mendorong Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Penyusunan Prolegnas 2012 yang Adil Gender”** yang dilaksanakan pada 18 Januari 2012, dengan narasumber, Eva Kusuma Sundari, Tetty Kadi Bawono, dan Andi Timo Pangerang, diikuti 100 peserta. **Semiloka Sosialisasi UU Pemilu dan Menyiapkan Strategi Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2012** di Jakarta dan Padang, pada Mei dan Juni, masing-masing diikuti oleh 40 peserta. Lokakarya dan Diskusi Pakar diselenggarakan dua kali, yaitu : Strategi Pendidikan Anti Korupsi bagi perempuan, pada Februari 2012 melibatkan 20 pakar dan Strategi Advokasi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, merespon berbagai bentuk penolakan, pada Juni 2012, melibatkan 8 pakar. **Simposium Nasional RUU Desa** dengan topik Menuju Pembangunan Desa yang Adil Gender dan Mensejahterakan Kehidupan Bangsa, diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta pada Tanggal 27-28 September 2012, melibatkan 100 peserta. Sekitar 308 orang peserta dan 20 orang panitia terlibat dalam berbagai kegiatan – kegiatan pertemuan strategis ini.



Selain itu, diselenggarakan pula pertemuan koordinasi, monitoring dan evaluasi program untuk advokasi isu anti korupsi dan keterwakilan perempuan dalam politik, seperti : **Regional Women Network (Juni)** merupakan lanjutan dari pertemuan tahun sebelumnya, diselenggarakan oleh Kemitraan untuk mendorong lahirnya pengelompokan (kaukus) perempuan dan politik di tingkat regional (Asia Tenggara), **Konferensi Tahunan Program IKAT (Juni)**, Kegiatan tahunan yang diikuti oleh 75 orang yang berasal dari seluruh partner program IKAT untuk memberi

kesempatan bagi anggota organisasi mitra IKAT untuk saling belajar dan berjejaring intra-inter area tematik/kemitraan.

Konsultasi dan dialog publik Tingkat Kabupaten/Kota tentang Perempuan melawan Korupsi dilakukan di 8 Kabupaten/kota di 3 Provinsi : Provinsi Jawa Tengah (Demak, Kendal dan Salatiga), Provinsi Kalimantan Timur (Tarakan, Samarinda, dan Kutai Kertanegara) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Donggala, dan Toli-Toli). Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Oktober dan November 2012. Melibatkan sekitar 650 peserta dan 50 panitia dan narasumber terlibat dalam pertemuan ini. Dialog publik dengan tema Perempuan Melawan Korupsi juga diselenggarakan tingkat Provinsi, yaitu di Semarang (Jawa Tengah) dan Palu (Sulawesi Tengah) melibatkan sekitar 200 orang.

Selain itu dilakukan Talkshow radio dan televisi, Konferensi pers dan aksi damai untuk merespon situasi aktual maupun memperingati hari-hari penting di tingkat nasional maupun internasional seperti peringatan Hari Kartini, Hari Ibu, Hari Kemerdekaan, Hari Perempuan Internasional, Hari Internasional Perempuan Pedesaan, Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari AIDs Sedunia, Hari Internasional Penghapusan Perbudakan, Hari Penyandang Cacat Internasional, Hari Anti Korupsi, Hari Hak Asasi Manusia, dan Hari Migrasi Internasional)

H. Peningkatan Kapasitas Advokasi

Peningkatan kapasitas advokasi dilakukan melalui pendidikan advokasi untuk bagi pemula di NTT, Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer – TOT) Anti Korupsi, pendidikan advokasi Anti Korupsi bagi anggota Koalisi Perempuan Indonesia di 27 desa di Jawa Tengah, Palu dan Kalimantan Timur. Kegiatan ini menghasilkan : Sekitar 35 Kader dan pengurus Koalisi Perempuan di NTT memahami makna dan strategi advokasi, sejumlah 80 orang



fasilitator mampu memfasilitasi pendidikan anti korupsi di tingkat basis, sebanyak 886 anggota Balai Perempuan memahami isu korupsi dan mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, 400 komunitas bukan anggota Koalisi Perempuan Indonesia menerima informasi tentang definisi korupsi, dampak dan hukuman bagi koruptor.

Selain kegiatan di tingkat nasional, kegiatan di tingkat regional dilakukan dalam bentuk: **1) Fasilitasi pelatihan kepemimpinan transformative bagi calon anggota legislatif perempuan di Timor Leste (Mei)** kerjasama dengan Women Caucus in Politic Timor Leste, **2) Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Asia Pasific Women Law and Development (APWLD)** menyelenggarakan Training Women in Politik tingkat regional yang diselenggarakan di Jakarta Pada 23-26 November 2012, dan **3) Training on Research and Methodology for Promoting Women's Political Representation in South East Asia** (Februari)

2) Pelaksanaan Program Penguatan Organisasi

A. Pemetaan berbasis Kelompok Kepentingan dan Balai Perempuan

Pemetaan dilakukan pada kelompok kepentingan petani, pesisir dan nelayan, buruh migrant, ibu rumah tangga dan pemetaan situasi perempuan dan anak berbasis area tempat tinggal (desa/kelurahan).

Metode Pemetaan dilakukan dengan beberapa cara : **1)** pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan community organizer (CO) yang telah dilatih dan bekerja di beberapa daerah, **2)** melalui diskusi tematik yang dilakukan oleh kader dan atau pengurus setempat atau pengurus nasional dan staff sekretariat nasional, **3)** menggunakan kuisisioner/form yang disusun oleh sekretariat nasional, **4)** *Focus Group Discussion* (FGD) desa dan **5)** lokakarya di tingkat kabupaten.

Pemetaan persoalan Kelompok Kepentingan Perempuan Petani dilakukan di wilayah **1)** Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pengorganisasian, pertemuan kelompok kepentingan petani se-NTB dan pendidikan kader dasar (PKD), **2)** Nusa Tenggara Timur (NTT)

dilakukan melalui pengorganisasian dan PKD, 3) di Jawa Barat dilakukan melalui PKD dan 4) Jawa Tengah juga dilakukan melalui PKD. Sekitar 900 perempuan petani, 50 Community organizer dan 15 Fasilitator terlibat dalam pemetaan ini. Hasil dari pemetaan adalah isu-isu strategis Kelompok Perempuan Petani serta strategi advokasi di tingkat daerah.

Pemetaan persoalan Kelompok Kepentingan Perempuan Pesisir dan Nelayan di 1) wilayah Jawa Barat melalui pendidikan kader dasar di cabang Indramayu, cabang Cirebon ; 2) di wilayah NTB dan NTT melalui pengorganisasian, pendidikan kader dasar, FGD desa dan lokakarya di kabupaten ; 3) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara melalui FGD desa dan lokakarya di kabupaten. Pemetaan ini melibatkan 400 perempuan pesisir dan nelayan, 22 Community Organizer dan 10 fasilitator. Hasil dari pemetaan ini adalah isu-isu strategis perempuan pesisir dan nelayan serta rencana advokasi di tingkat Balai Perempuan dan Cabang.

Pemetaan persoalan Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran dilakukan melalui pertemuan kelompok kepentingan, pengorganisasian, pendidikan kader dasar dan assessment situasi dasar perempuan dan anak di NTB dan NTT, pendidikan kader dasar di Jawa Barat, sosialisasi organisasi, diskusi informal di Jawa Timur dan Jawa Tengah, penanganan kasus di Jawa Timur dan Sumba (NTT). Pemetaan ini melibatkan sekitar 300 anggota kelompok kepentingan buruh migrant, 8 Community Organizer dan 9 fasilitator. Hasil pertemuan adalah prioritas isu strategis yang akan diadvokasikan di tingkat daerah, nasional dan jejaring dengan organisasi lain untuk advokasi tingkat internasional.

Pemetaan persoalan Kelompok Kepentingan Perempuan Ibu Rumah Tangga melalui pendidikan kader dasar, pengorganisasian, FGD dan lokakarya tingkat kabupaten di NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ; pendidikan kader dasar di Jawa Barat dan Yogyakarta. Pemetaan ini melibatkan sekitar 3.200 perempuan Ibu Rumah Tangga, 90 Community Organizer, 30 fasilitator. Hasil pemetaan adalah isu

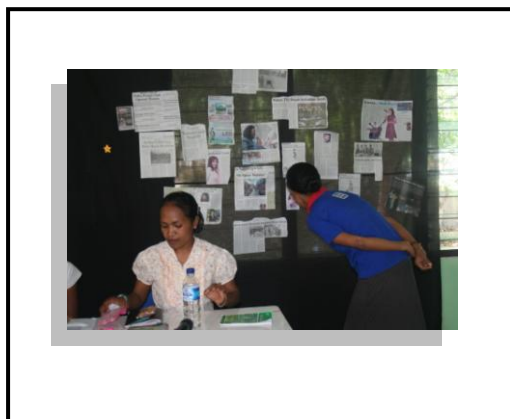
strategis ibu rumah tangga, strategi mengatasi masalah dan agenda untuk meningkatkan kapasitas sumber daya.

Pemetaan Berbasis desa/kelurahan melalui pengorganisasian, penjajagan lapangan, FGD desa dan lokakarya kabupaten di NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan pada Februari – Juni 2012. Pemetaan ini juga mengacu pada indikator pemenuhan pasal 14 CEDAW tentang perempuan pedesaan dan menjadi bahan laporan yang disusun dan disampaikan oleh pokja RKP. Pemetaan dilakukan di 110 Balai Perempuan baru yang terbentuk selama tahun 2012.

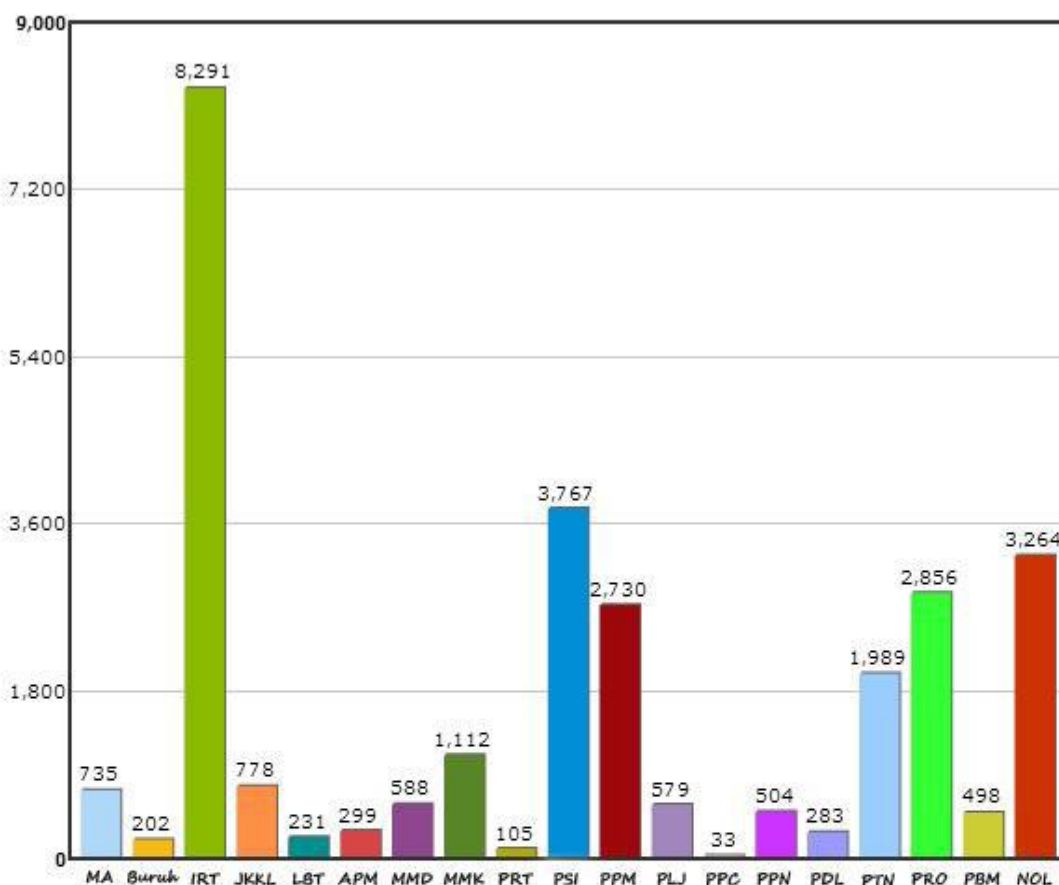
B. Penguatan Organisasi dan Kelompok Kepentingan

Penguatan kapasitas kader untuk pengorganisasian dilakukan melalui pelatihan bagi anggota Kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk menjadi Community organizer (CO). Selama tahun 2012 telah dilatih sekitar 433 kader Koalisi Perempuan Indonesia untuk menjadi CO. Dari keseluruhan jumlah CO yang telah dilatih, **sebanyak 288 CO** berada di kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya (NTT), kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Bima dan Dompu (NTB), kabupaten Buton Utara dan Muna (Sultra), kabupaten Jeneponto, Takalar dan Bantaeng (Sulsel), **sejumlah 60 CO** berada di Mataram, Sumbawa, Sumbawa Besar, Lombok Barat dan Lombok Timur (NTB) serta di Kupang, Sikka, Ngada dan Flores (NTT) dan **sejumlah 85 CO** berada di Bengkulu, Jambi dan Jawa Timur.

Hasil dari proses pengorganisasian yang dilakukan oleh seluruh kader organisasi saat ini telah ada anggota Koalisi Perempuan Indonesia **sejumlah 36.000 orang, telah terbentuk 590 balai perempuan, 106 cabang dan 14 wilayah.**



Koalisi Perempuan Indonesia



MA = Perempuan Masyarakat Adat;
 PLJ = Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo;
 PRO = Perempuan Profesional;
 PSI = Perempuan Pekerja Sektor Informal;
 MMK = Perempuan Masyarakat Miskin Kota;
 MMD = Perempuan Masyarakat Miskin Desa;
 PPM = Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa;
 PDL = Perempuan yang Dilahirkan (Pedila);
 Buruh = Perempuan Buruh;
 JKKL = Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang;
 APM = Anak Perempuan Marjinal;
 PTN = Perempuan Petani;
 PPN = Perempuan Pesisir dan Nelayan;
 IRT = Perempuan Ibu Rumah Tangga;
 LBT = Lesbian, Biseksual dan Trans-gender;
 PPC = Perempuan Penyandang Cacat;
 PBM = Perempuan Buruh Migran;
 PRT = Perempuan Pekerja Rumah Tangga.
 NOL = Tidak ada Kelompok Kepentingan.

Pertemuan untuk **konsolidasi Kelompok Kepentingan** diselenggarakan untuk **Kelompok kepentingan Perempuan Petani se Nusa Tenggara Barat**, di asrama haji Lombok Timur pada awal Juli 2012, melibatkan sekitar 70 perempuan petani. Temu **Perempuan Buruh Migran se Nusa**

tenggara Barat diselenggarakan di Sumbawa Besar pada Maret 2012, melibatkan 87 perempuan buruh migrant dan mantan buruh migrant.

Konsolidasi wilayah dan cabang dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang diselenggarakan bekerjasama antara pengurus nasional, staff sekretariat nasional dan pengurus di tingkat cabang dan wilayah.

C. Kongres Wilayah

1. **Regio Sumatera (Sumatera Barat)** telah terlaksana Kongres Wilayah Sumatra Barat, pada Februari 2012 dan telah memilih sekretaris wilayah yang baru yaitu saudara Tanti Herida dengan 8 presidium wilayah dari kelompok kepentingan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Pekerja Sektor Informal, Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Perempuan Petani, Perempuan Lansia, Perempuan Profesional, Perempuan Miskin Desa, Perempuan Masyarakat Adat dan menyusun program kerja wilayah.

2. **Regio Jawa (DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur)**

- a. Kongres Wilayah DKI Jakarta terlaksana pada 9-10 November 2012 dan telah terpilih saudara Nunung Fatma sebagai sekretaris wilayah dengan 9 presidium wilayah dari kelompok kepentingan Perempuan Disabilitas, Miskin Kota, Perempuan yang Dilacurkan, Perempuan Lansia dan Jompo, Perempuan Ibu Rumah Tangga, Anak Perempuan Marjinal, Perempuan Profesional, Perempuan Janda Kepala Keluarga dan Lajang, Perempuan Pesisir dan Nelayan. Selain itu juga kongres menghasilkan rekomendasi politik dan menyusun program kerja wilayah untuk periode 2012-2016. Peserta kongres wilayah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus wilayah dengan beberapa catatan karena terlalu lama pengurus vakum, data-data dan administrasi organisasi tidak diserahkan pada pengurus terpilih sehingga pengurus terpilih mengalami kesulitan untuk mengakses data

organisasi. Tidak adanya kelompok kepentingan Lesbian, Transgender dan Biseksual.

- b. Kongres Wilayah Jawa Tengah terlaksana pada 26-27 Januari 2013. Terpilih saudara Hanifah Muyasarah sebagai sekretaris wilayah dan 6 presidium wilayah dari kelompok kepentingan Perempuan Buruh, Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Petani, Perempuan Profesional, Perempuan Lansia dan Jompo, Perempuan Pesisir dan Nelayan. Telah tersusun pula program kerja wilayah untuk periode 2013-2017. Laporan pertanggungjawaban pengurus periode lalu telah diterima dengan catatan perbaikan pada laporan keuangan.
- c. Kongres Wilayah Jawa Timur terlaksana pada tanggal 10-11 November 2012. Terpilih saudara Wiwiek Afifah sebagai sekretaris wilayah dan 11 presidium wilayah dari kelompok kepentingan Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Perempuan yang Dilacurkan, Perempuan Petani, Perempuan Profesional, Perempuan Lansia dan Jompo, Perempuan Janda Kelapa Keluarga dan Lajang, Perempuan Pesisir dan Nelayan, Perempuan Pekerja Informal, Anak Perempuan Marjinal. Selain itu kongres juga membuat rekomendasi politik dan menyusun program kerja untuk periode 2012 – 2016. Catatan untuk pelaksanaan kongres wilayah Jawa Timur : Kongres ini dihadapkan pada persoalan regenerasi kepemimpinan, mengingat saat akan pemilihan sekretaris Wilayah, hampir tidak ada calon yang mengajukan diri.

3. Regio Sulawesi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara)

- a. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sudah melakukan konsolidasi cabang dan persiapan di tingkat pengurus wilayah ; Sulawesi Tengah sudah membentuk Dewan Pengarah.
- b. Sulawesi Utara saat ini telah terbentuk 5 cabang dengan dilaksanakannya konferensi cabang Tomohon pertama pada Januari 2013.

D. Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang ke-1

a. Regio Sumatera (Kab. Empat Lawang – Sumsel)

Belum terlaksana karena keterbatasan sumberdaya dan dana di setnas. Hasil pengorganisasian yang dilakukan CO di kabupaten Empat Lawang hasilnya antara lain terbentuknya 4 balai perempuan. Selain itu isu dan kebijakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah tersosialisasikan, bahkan Koalisi Perempuan Indonesia sudah dimintai masukan oleh bagian pemberdayaan perempuan di kabupaten yang belum lama mekar dari kabupaten Lahat ini. Saat ini komunikasi dengan balai-balai perempuan tersebut harus diakui kurang intensif dilakukan oleh sekretariat nasional sehingga kurang diketahui perkembangan balai-balai perempuan tersebut saat ini.

b. Regio Jawa (Kendal – Jawa Tengah ; 5 kabupaten di Banten)

- i. Kendal telah melakukan konfercab pada tanggal 12 Juli 2012 sekretaris cabang terpilih : saudari Endah Puspitanti, SH dan terbentuk 4 kelompok kepentingan yakni : Perempuan Profesional, Perempuan Pesisir dan Nelayan, Perempuan Petani dan Ibu Rumah Tangga.
- ii. Di 5 kabupaten di Banten belum terbentuk balai-balai perempuan kecuali kabupaten Serang dan kabupaten Tangerang. Dibutuhkan CO dan kecukupan dana untuk itu. Rencana pembentukan cabang di Banten ini merupakan usulan dari cabang di Banten yang menjadi peserta rakernas 2012 dan juga anggota yang ada di kabupaten Serang.

c. Regio Kalimantan (Kab. Bulungan – Kaltim)

Belum terlaksana ; diorganisir dan diusulkan oleh cabang Tarakan. Tetapi belum ada rencana lanjut untuk konferensi cabang mengingat keterbatasan waktu kader di cabang Tarakan dan setnas, juga keterbatasan dana yang ada di setnas untuk mendukung pembentukan cabang baru di region Kalimantan.

d. Regio Sulawesi (Tomohon – Sulut ; Jeneponto dan Bantaeng Sulsel)

- i. Tomohon (Sulut) ; telah terlaksana pada 18 Januari 2013. Terpilih saudara Nunu Suratiyono sebagai sekretaris cabang dan 5 dewan kelompok kepentingan, masing-masing dari kelompok kepentingan Perempuan Masyarakat Adat, Perempuan Petani, Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Lansia dan Jompo, Perempuan Pekerja Informal. Selain itu, kabupaten Tomohon juga melakukan seminar dan konsultasi public pembangunan berkelanjutan paska MDG 2015.
- ii. Jeneponto dan Bantaeng (Sulsel) dalam persiapan ; akan melakukan pengorganisasian intensif setelah training CO.

e. Regio Bali dan Sunda Kecil

- i. Kabupaten Sikka – NTT melaksanakan konfercab I pada bulan Juni 2012. Terpilih saudara Ursula Maria sebagai sekretaris cabang dan 3 dewan kelompok kepentingan dari kelompok kepentingan Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Petani dan Perempuan Miskin Kota. Tersusun rekomendasi politik cabang dan program kerja untuk periode 2012-2015.
- ii. Kabupaten Ngada – NTT melaksanakan konfercab pada 1 Desember 2012 dan terpilih saudara Cornelia Ene sebagai sekretaris cabang dengan 3 dewan kelompok kepentingan berasal dari kelompok kepentingan Perempuan Profesional, Perempuan Ibu Rumah Tangga dan Perempuan Petani. Cabang Ngada saat ini telah terbentuk 6 balai perempuan.
- iii. Kabupaten Flores Timur – NTT telah melaksanakan konferensi cabang pada 25 Januari 2013 dengan sekretaris cabang terpilih saudara Bededicta Boleng Hera dan 3 dewan kelompok kepentingan berasal dari kelompok kepentingan Perempuan Petani, Perempuan Ibu Rumah Tangga dan Perempuan Janda Kelapa Keluarga dan Lajang. Di Cabang Flores Timur saat ini

telah terbentuk 9 Balai Perempuan yang tersebar di 3 kecamatan.

- iv. Kota Mataram - NTB telah melaksanakan konfercab pada tanggal 25 September 2012 dan terpilih saudara Nur Jannah sebagai sekretaris cabang dan 6 kelompok kepentingan yakni : Ibu Rumah Tangga, Perempuan Profesional, Perempuan Pekerja Sektor Informal, Perempuan Buruh Migrant, Perempuan Pesisir dan Nelayan, Perempuan Pekerja Rumah Tangga.
- v. Kabupaten Sumbawa Barat, kabupaten Lombok Utara dan kabupaten Lombok Timur – NTB hingga saat ini masih belum melaksanakan konferensi cabang dan berfokus pada penguatan balai-balai perempuan dan kelompok kepentingan melalui pengorganisasian dan pendidikan kader dasar.
- vi. Kabupaten Bima telah melaksanakan konferensi cabang I dan terpilih saudara Rufida sebagai sekretaris cabang. Cabang kabupaten Bima ini merupakan pemekaran dari cabang Bima yang semula terdiri dari kota Bima dan kabupaten Bima. Sedangkan untuk konferensi cabang ke-2 kota Bima hingga saat ini masih dalam proses konsolidasi dan persiapan.
- vii. Bali masih proses pembentukan balai-balai perempuan ; usulan rencana pembentukan cabang tahun 2012 sebaiknya diundur ke 2013. Area yang intensif melakukan pengorganisasian saat ini adalah kabupaten Tabanan, Karangasem dan Bangli. Tetapi yang sudah terbentuk balai perempuan baru di kabupaten Tabanan.

2. Konferensi Cabang ke-2 dan ke-3

- a. Cabang Kolaka – Sulawesi Tenggara terlaksana pada tanggal 23 Desember 2012. Terpilih saudara Suharti sebagai sekretaris cabang dan 3 dewan kelompok kepentingan, masing-masing dari kelompok kepentingan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan Petani.

- b. Cabang Jepara – Jawa Tengah terlaksana pada tanggal 31 Desember 2012 Terpilih saudari Nur Chamnah sebagai sekretaris cabang dan 6 Kelompok Kepentingan yakni Perempuan Profesional, Perempuan Pekerja Sektor Informal, Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Perempuan Lansia dan Buruh Perempuan.
- c. Cabang Pontianak – Kalimantan Selatan terlaksana pada tanggal 22 Desember 2012. Terpilih saudara Dessy Khaerani sebagai sekretaris cabang dan 4 dewan kelompok kepentingan, yakni Perempuan Lesbian, Bisexual dan Transgender, Perempuan Pekerja Sektor Informal, Perempuan Profesional dan Ibu Rumah Tangga

E. Pendidikan Kader Berjenjang

Pendidikan Kader Dasar (PKD) dalam rentang waktu Januari 2012 hingga Januari 2013 telah terlaksana di 6 propinsi, 19 kabupaten/kota, dan 85 desa/kelurahan. PKD melibatkan 2.365 peserta, 166 panitia tingkat desa. Total anggota yang telah terlibat dalam PKD sejak 2005 – Jan 2013 sebanyak 5.842 orang (*data kader PO_Setnas, Januari 2013*).

Pendidikan Kader Menengah (PKM) dan Pendidikan Kader Lanjut (PKL) tidak diselenggarakan pada tahun 2012.

Pendidikan Anti Korupsi dilakukan dalam bentuk Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Anti korupsi dilaksanakan untuk mencetak fasilitator Pendidikan Anti Korupsi yang akan dilaksanakan di 3 wilayah (Jawa Tengah, Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Kartanegara dan Tarakan dan Sulawesi Tengah) dan pendidikan di tingkat Balai Perempuan di 27 Balai Perempuan. Pendidikan ini merupakan Program: Strengthening Women's Role in Combating Corruption Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi dan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Hasil dari pendidikan ini adalah adanya 80 fasilitator yang menguasai isu korupsi dan 886 anggota/kader Koalisi Perempuan Indonesia. Model pendidikan di anti Korupsi ini menggabungkan antara penambahan

pengetahuan, pengorganisasian perempuan dan advokasi terhadap proyek atau pun penyelenggaraan pelayanan public yang diindikasikan adanya praktek korupsi.

Loklatih advokasi dasar (NTT) Dilakukan di kabupaten Ngada pada tanggal 26-30 Maret 2012 di Rumah Retret Kemah Tabor Mataloko Ngada. Loklatih ini difasilitasi oleh Dian Kartikasari (Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia) dan Mike Verawati Tangka (Koord. Pokja Reformasi Kebijakan Publik Setnas). Loklatih advokasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan advokasi yang selama ini sudah sering dilakukan di masing-masing desa/kelurahan bahkan tingkat kabupaten/kota. Loklatih ini terselenggara juga atas usulan dari anggota di Nusa Tenggara Timur antara lain karena mereka merasa penting memahami dan memantapkan pengetahuan mengenai langkah-langkah advokasi.

Training Riset dan Workshop Metodologi dan design Riset dilaksanakan di hotel Fiducia, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari tanggal 14 November hingga 19 November 2012. Diikuti oleh 15 orang peserta dengan rincian, 1 orang fasilitator, 1 orang notulensi, 2 orang OC, 9 orang peneliti yang terdiri dari 6 orang peneliti lokal dan 3 orang peneliti nasional, 2 orang koordinator peneliti. Peneliti nasional dan lokal berasal dari Jambi, Bengkulu dan Jawa Timur sementara koordinator peneliti berasal dari Seknas Jakarta.

Materi metodologi penelitian kualitatif disampaikan oleh Prof. Dr. PM Laksono, metodologi penelitian kuantitatif oleh Dr.

Sarwititi S. Materi program perlindungan sosial dipaparkan Puwanto AN SE, MSC dari TNP2K, materi metode analisis gender frame work oleh Dian Kartikasari SH dari Koalisi Perempuan Indonesia.



F. Pembuatan Media Pendidikan Kader.

Revisi buku saku organisasi bertujuan untuk mengsinkronkan buku saku versi 2008 dengan aturan organisasi (AD ART) pasca kongres nasional III. Sampai saat ini draft buku saku sudah mendapatkan masukan dari sekretariat nasional & presidium nasional akan tetapi masih membutuhkan kompilasi dan editan untuk proses cetak.

Modul Pendidikan Kampanye Anti Korupsi dibuat untuk kepentingan ToT Anti Korupsi dan modul untuk pelatihan ditingkat BP/komunitas. Pembuatan modul ini sudah berlangsung sejak Januari – April 2012. Penyusunan modul ini melibatkan 7 orang sebagai tim penyusun, dan telah mendapatkan masukan dari dari expert yang berasal dari presidium nasional Koalisi Perempuan Indonesia, LSM (Fitra, TI), dan KPK. Selain itu modul ini juga dikritisi oleh 3 pengurus wilayah dan cabang area program serta peserta ToT Pendidikan Anti korupsi di 3 region. Capaiannya Modul sudah di launching dan tercetak sebanyak 100 eksemplar, direncanakan akan diperbanyak 250 eksemplar lagi.

Modul Pendidikan Advokasi bagi pemula, disusun untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan advokasi bagi pemula, yang diselenggarakan di NTT.

G. Kebencanaan & Lingkungan Hidup

Mobilisasi bantuan ini diutamakan untuk bantuan bencana alam yang dialami wilayah dan cabang. Mobilisasi bantuan berupa barang (pakaian layak pakai, susu, makanan instant, pembalut, obat-obatan, selimut) dan juga uang. Sebagaimana telah disebarluaskan kepada anggota, penggalangan bantuan uang yang disebut “Gerakan 1000 rupiah untuk Perempuan dan Anak korban Bencana” diharapkan makin memperkuat solidaritas antar anggota.

Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia menerima bantuan berupa barang dari anggota dan masyarakat umum untuk korban bencana. Barang-barang bantuan tersebut berupa : Pangan & Minuman (mie instan, susu, biskuit, air mineral) , obat-obatan, pembalut wanita, pampers balita, pakaian baru dan pakaian bekas, selimut dan peralatan dapur/peralatan makan.

Penyaluran bantuan selama tahun 2012 yang dilakukan sekretariat nasional untuk membantu korban bencana banjir pada tanggal 20 – 22 Januari 2013 di Muara Angke, Kamal Muara, Rawa Terate, Kampung Walang, Petamburan dan masyarakat korban banjir di Rawa Jati, Kalibata, Pengadegan yang bukan merupakan balai perempuan Koalisi Perempuan Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan melalui aksi kebersihan lingkungan, pembuatan pupuk organik dari sampah dan limbah, diskusi tentang pengelolaan sumber daya alam dan advokasi terkait dengan penambangan pasir serta bahaya abrasi laut dan penanggulangannya. Disamping itu, beberapa balai perempuan juga membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan dan ekonomi mereka. Pembuatan pupuk dan pengelolaan sampah melalui “Rumah Sampah” selain untuk mencegah bencana kerusakan lingkungan juga dimanfaatkan sebagai media pengorganisasian dan penggalangan dana di tingkat Balai Perempuan.

H. Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Riset Aksi

Penguatan Kapasitas Riset dilakukan lokakarya metodologi riset aksi bagi peneliti dan lokakarya perumusan desain riset. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Akses Perempuan terhadap program perlindungan social dan pengurangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai suatu desain riset aksi maka riset ini akan memberikan dampak pemberdayaan bagi peneliti maupun responden.

Pelaksanaan Riset dilakukan di 6 kabupaten/kota di 3 Provinsi. Di setiap Kabupaten dilakukan di 3 desa, sehingga mencakup 18 desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi campuran Kualitatif dan kuantitatif, dengan titik tekan pada metode kualitatif.

Hasil temuan dari riset akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi kebijakan, yaitu menawarkan konsep baru Perlindungan social : Perlindungan sosial yang inklusif adil gender dan transformative.

Kegiatan riset lapangan yang baru pertama kali dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini, sekaligus dijadikan sebagai langkah awal untuk membangun Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk Penguatan organisasi dan advokasi kebijakan public.

3) Pelaksanaan Kegiatan Sistem Dukungan

a. Management dan Teknologi Informasi

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2012 beberapa hal yang telah dilakukan oleh divisi IT dan SMI sebagai support system dari kelompok kerja yang ada di sekretariat nasional antara lain: **Pengelolaan Website dan account media sosial, penyediaan Alat Kampanye, penyusunan dan penerbitan Semai (bulletin organisasi), kampanye melalui media.**

Pengelolaan website dilakukan melalui pembaharuan konten dan layout website sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengunjung website Koalisi Perempuan Indonesia. Jumlah pengunjung selama tahun 2012 mencapai 26.477 pengunjung, atau rata-rata sekitar 100 orang/hari. Media sosial FaceBook (FB) yang dikelola sekretariat nasional, sampai akhir 2012 berjejaring dengan 1.443 teman dan fanpage Koalisi perempuan Indonesia disukai oleh 688 orang. Sementara FB dengan Account Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai jaringan sebanyak 808 teman Twitter mempunyai follower sebanyak 135 dan memfollow 61 jaringan ngo, media dan juga personal. Update FB dan twiter dilakukan setiap hari kerja dengan melihat berita yang terkait dengan kegiatan organisasi.

Alat kampanye untuk advokasi selama tahun 2012 telah diproduksi :1) Penerbitan **4 thema Facsheet** (Keterwakilan perempuan dalam politik, keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara

pemilu dan musrenbang), 2) **Penerbitan 3 judul poster** (STOP Korupsi, Alur Perencanaan dan Penganggaran dan Kalender musyawarah Perencanaan Pembangunan partisipatif), 3) Pencetakan Laporan Universal Periodic Review (UPR), 4) Pencetakan Laporan CEDAW Pasal 14 Tentang Hak Perempuan pedesaan.

Pembuatan alat-alat pendidikan dan Penguatan Organisasi : 1) Penerbitan Buku Saku, 2) Pencetakan AD/ART, 3) Pembuatan Bendera, 4) Pembuatan Kartu iuran anggota, 5) Pencetakan Modul dan 6) Pembuatan Film Perkembangan Koalisi Perempuan Indonesia.

Penerbitan SEMAI, diterbitkan satu edisi SEMAI tentang Kebijakan yang Adil Gender. Penerbitan SEMAI direncanakan akan terbit 4 edisi dalam 1 tahun. Namun karena kekurangan sumber daya manusia pada divisi tersebut, maka tidak dapat dicapai target penerbitan 4 Edisi SEMAI.

Kampanye melalui media, dilakukan dengan cara menyelenggarakan **Media Briefing**, Konferensi Pers, Pengiriman Press Release, dan Talkshow TV dan radio. Konferensi Pers dilakukan berkaitan dengan penyampaian catatan Awal tahun, peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan dan Respon terhadap persiapan Pemilu. Pengiriman Press realease dilakukan untuk mengirimkan 10 pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia merespon situasi terkini. TalkShow Radio dan TV difokuskan pada kampanye Anti Korupsi dan Peningkatan Representasi politik perempuan.

b. Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan dalam bentuk, pengurusan dokumen legal organisasi di tingkat nasional, wilayah dan cabang seperti penyiapan akte notaries, pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian dalam Negeri, Ijin Domisili dan lain-lain.

Tatakelola personalia dilakukan dengan pengelolaan data & administrasi, rekrutmen staff, pembuatan kesepakatan kerja serta pemenuhan hak-hak staff sekretariat nasional.

Tatakelola sekretariat dilakukan melalui pembuatan Surat Keputusan /kebijakan (SK) Sekertaris jenderal dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan- tindakan penting terkait dengan tata kelola organisasi. Diterbitkan SK sebagai berikut : 1) SK - Peraturan Perjalanan Dinas, 2) SK - Biaya Perjalanan Dinas, 3) SK - SOP Keuangan dan 4) SK - Kebijakan Perlindungan Anak

Selain itu, untuk menjamin berlangsungnya fungsi sekretariat nasional mendukung kerja-kerja organisasi, maka dikelola kegiatan rutin operasional kantor sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, seperti kerumahtanggaan, administrasi umum, perpustakaan, fasilitas rapat-rapat organisasi untuk koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi.

c. Pengelolaan Keuangan dan asset organisasi

Dilakukan melalui penggalangan dana, pencatatan dan pelaporan keuangan, audit keuangan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyediaan laporan keuangan secara berkala sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan di tingkat sekretariat dan organisasi. Serta dilakukan control terhadap pengelolaan keuangan dan asset organisasi untuk memastikan bahwa keuangan dan asset organisasi digunakan secara maksimal untuk mencapai visi dan misi organisasi.

2. CAPAIAN PROGRAM

Capaian penting Program Reformasi Kebijakan Publik adalah :

1. Terciptanya dialog kebijakan antara Koalisi Perempuan Indonesia dengan DPR RI dan Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan Publik.
2. Diakomodirnya usulan Koalisi Perempuan Indonesia –pengintegrasian Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam UU Penanganan Konflik Sosial

3. Diakomodirnya usulan Koalisi Perempuan Terkait upaya Memperkuat Pangan Lokal Kedaulatan Pangan, Perlindungan Petani untuk mewujudkan kedaulatan Pangan dan Pemenuhan Hak atas Pangan dalam UU Pangan
4. Dikenalnya Isu Gender & Korupsi di Indonesia. Selama ini pembahasan Korupsi di Indonesia tidak pernah menghubungkan dengan isu ketidakadilan gender.
5. Dikenalnya strategy Pengembangan Budaya **Toleransi Nol terhadap Korupsi** dalam Pendidikan Anti Korupsi.
6. Dikenalnya strategi pencegahan korupsi sejak dini dari dalam Rumah Tangga
7. Pemutakhiran strategi untuk menggabungkan kerja pengorganisasian dengan advokasi, yaitu melalui **pintu masuk** : 1). Pendidikan anti korupsi dan penuntutan hak atas informasi serta penghentian praktek korupsi. Strategi ini disebut Strategi Aksi Perempuan Melawan Korupsi 2). Riset Aksi : Akses Perempuan Terhadap Program Perlindungan Sosial dan Program pengurangan kemiskinan.
8. Ditemukannya irisan Issue (crosscutting issue) antara Hak Asasi Manusia, Gender, Korupsi & Perlindungan Sosial.
9. Menguatnya Perubahan paradigma dalam Pembahasan Isu Korupsi dari Paradigma Politik ke Paradigma Kesejahteraan dan HAM
10. Ditemukannya beberapa strategi pendidikan advokasi, baik pendidikan khusus untuk advokasi maupun melalui pembahasan/pendidikan berbasis issue (Korupsi, Program Perlindungan Sosial, Surat Nikah, Akte Kelahiran, Air bersih, Pendidikan dan Hak-hak Korban bencana)
11. Ditemukannya strategi advokasi yang mengaitkan Persoalan di Balai Perempuan-daerah-Nasional – Internasional melalui Penyusunan Laporan CEDAW Pasal 14 tentang Hak –Hak Perempuan Pedesaan
12. Meningkatnya aktifitas dan diterimanya Koalisi Perempuan dalam advokasi di tingkat Regional dan internasional.
13. Dimulainya Strategi baru –Advokasi berbasis Riset
14. Sejumlah 80 fasilitator mampu melakukan pendidikan advokasi Anti korupsi
15. Sejumlah 886 kader memperoleh pengetahuan tentang korupsi dan melakukan pendidikan anti korupsi di tingkat keluarga serta melakukan advokasi kasus-kasus korupsi di bidang pelayanan publik

16. Koalisi Perempuan Indonesia dipercaya untuk memberikan pelatihan bagi calon anggota Legislatif di Timor Leste

Capain Penting Program Penguatan Organisasi adalah :

1. Perangkat pemetaan (tools assessment) yang telah disusun oleh Sekretariat nasional, dapat digunakan oleh pengurus Balai Perempuan, cabang dan wilayah untuk melakukan pemetaan secara mandiri.
2. Ditemukannya strategi pengorganisasian berbasis kewilayahan (desa) yang terstruktur dan efektif, melalui tahapan : 1) Pendidikan CO, 2) Penempatan /penugasan CO, sekurang-kurangnya selama tiga bulan, 3) Pemantauan berkala terhadap kerja-kerja pengorganisasian CO , 4) evaluasi bersama yang melibatkan pengurus setempat, Tim pengelola program dan masyarakat penerima manfaat (kelompok yang diorganisir) aparat desa setempat. Capaian dari pengorganisasian terstruktur ini adalah :
 - i. Penambahan jumlah anggota
 - ii. Penambahan jumlah kader (anggota yang telah terdidik)
 - iii. Penambahan struktur organisasi (Balai Perempuan & Cabang)
 - iv. Adanya penerimaan yang baik dari pemerintah, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat/tokoh agama terhadap kehadiran Koalisi Perempuan di desa atau kabupaten /kota tersebut.
3. Bertambahnya wilayah Pengorganisasian (yang sama sekali belum ada struktur organisasi Koalisi Perempuan (NTT)
4. Sejumlah 2.365 anggota telah memperoleh Pendidikan Kader Dasar yang diselenggarakan di 6 propinsi, 19 kabupaten/kota, dan 85 desa/kelurahan. PKD melibatkan 166 panitia tingkat desa.
5. Meningkatnya aktifitas Balai Perempuan dan keaktifan anggota setelah memperoleh Pendidikan Kader di tingkat Balai Perempuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya dan mengupayakan solusinya
6. Terkonsolidasinya Pengurus di wilayah yang menjadi area program pengorganisasian
7. Ditemukannya strategi untuk melakukan konsolidasi Kelompok kepentingan dan advokasi berbasis isu kelompok kepentingan
8. Bertambahnya jumlah CO , dari 17 orang CO menjadi 433 orang CO tersebar di berbagai kabupaten/kota,
9. Bertambahnya jumlah modul, kurikulum dan bahan pelatihan (Modul Anti Korupsi, Modul Advokasi untuk Pemula di Tingkat Balai Perempuan,

Modul Kepemimpinan untuk Caleg, Modul ketrampilan Politik Bagi Caleg dan kurikulum untuk Pelatihan CO)

10. Ditemukannya model Riset aksi yang menggabungkan antar kerja pengorganisasian dan riset untuk advokasi
11. Terlaksananya Mekanisme Demokrasi Organisasi (Kongres Wilayah, Konferensi Cabang
12. terselesaikannya masalah ke-*Vacum*-an kegiatan struktur/ kepengurusan (DKI Jakarta)
13. Adanya rancangan perangkat Monitoring dan Evaluasi untuk Pendidikan dan Pengorganisasian untuk melihat perubahan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat (namun rancangan ini masih perlu dibakukan)

Capaian penting dari sistem manajemen informasi (SMI)

1. Meningkatnya Pengunjung Website Koalisi Perempuan dari 80 pengunjung per hari menjadi 100 pengunjung per hari
2. Tersampainya pesan /posisi Koalisi Perempuan Indonesia kepada publik melalui website, media cetak, media elektronik dan jejaring sosial
3. Terjalinnnya hubungan dengan jurnalis & insan Media
4. Dijadikannya Koalisi Perempuan Indonesia sebagai rujukan informasi oleh media/jurnalis untuk isu-isu tertentu, seperti : Keterwakilan Perempuan dalam politik, pembahasan rancangan undang-undang,
5. Dikenalnya Media Award Koalisi Perempuan Indonesia
6. Digunakannya dokumen publikasi : Laporan CEDAW, Laporan UPR, Fact Sheet , Refleksi Pencapaian MDG di Indonesia, dll sebagai bahan diskusi oleh jaringan masyarakat sipil.
7. Terbangunnya komunitas /jejaring staf Publikasi/management sebagai wadah untuk saling belajar menggunakan sistem manajemen informasi untuk pengorganisasian gagasan, pengorganisasian orang dan untuk advokasi

Capaian penting dari penguatan kelembagaan antara lain :

1. Tersedianya aturan organisasi di tingkat Sekretariat sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi sekretariat.

2. Dukungan administrasi umum dan kerumahtanggaan memperlancar tugas, fungsi dan agenda unit-unit kerja dalam sekretariat nasional dan pengurus di daerah.
3. Terkelolanya sistem kepersonaliaan, menjamin terciptanya transparansi dan terpenuhinya hak-hak staff
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dan aman dapat mendukung kegiatan semua unit kerja dalam sekretariat dan kegiatan rutin organisasi

Capaian penting dari Pengelolaan Keuangan dan asset organisasi, adalah:

1. Terwujudnya sistem Pengelolaan Keuangan yang kredibel, sehingga Koalisi Perempuan Indonesia dipercaya oleh berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan
2. Tersampainya Laporan Keuangan secara rutin dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk memantau kemajuan program dan kemajuan organisasi, serta menjadi bahan dasar untuk pengambilan keputusan di tingkat management
3. Tersedianya Aturan di bidang Keuangan (SOP Keuangan) dan perencanaan anggaran sehingga dapat digunakan untuk negosiasi dengan pihak lain

3. PEMBELAJARAN

Situasi di tingkat daerah, nasional dan Internasional berubah dengan cepat, sebagai suatu organisasi gerakan, Koalisi Perempuan Indonesia diuntut untuk terus bersifat dinamis, merespon situasi yang ada.

Konsekwensi dari tuntutan untuk menjadi organisasi yang dinamis ini, mendorong organisasi untuk melakukan perubahan di tingkat strategi maupun pengelolaan sumber daya organisasi.

Cukup banyak pengalaman individu dan sekretariat yang akhirnya mendorong munculnya inovasi dan kreatifitas untuk pengembangan dan menciptakan keberlanjutan organisasi serta melakukan kerja-kerja advokasi.

Sekretariat nasional, perlu memikirkan ide untuk pengelolaan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki anggota, maupun sekretariat di tingkat Balai Perempuan, Sekretariat Cabang dan Sekretariat Wilayah, sehingga pengalaman dan pengetahuan tersebut dapat menjadi kekayaan organisasi dan berguna untuk

memperkuat kerja-kerja penguatan organisasi dan advokasi untuk reformasi kebijakan publik.

BAB IV

TANTANGAN KE DEPAN 2013

1. Momentum & Peluang Di Tahun 2013

1.1. Momentum penting di tahun 2013 , antara lain :

1. Persiapan Pemilihan Umum, terutama terkait dengan :

- a. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Maret 2013)
- b. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (Januari –Desember 2013)
- c. Penyusunan Platform Partai untuk Kampanye

2. Penyusunan Blue Print & Kebijakan Perlindungan Sosial

- a. Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial saat ini (sampai Maret 2014)
- b. Penyusunan Design dan konsep baru Perlindungan Sosial (April 2014)
- c. Penyusunan Kebijakan (2014- 2015)
- d. Implementasi Design Program dan Kebijakan Program Perlindungan Sosial (2015-dst)

3. Penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

- a. Konsultasi Tingkat Nasional yang diselenggarakan UKP4 (Feb 2013)
- b. High Level Panel (HLP) Meeting di Bali (Maret 2013)
- c. Finalisasi Agenda Pembangunan di tingkat UN (Mei-Des 2013 dan sepanjang 2014)

1.2. Peluang dan Tantangan di Tahun 2013

Moment penting tersebut di atas dapat direspond oleh seluruh sekretariat dan anggota Koalisi Perempuan secara swadaya dan berjejaring.

Beberapa kegiatan dapat memperoleh dukungan dari donor namun sangat terbatas jumlah dana dan cakupan wilayah/area yang dapat didukung. Inovasi penggalangan dana oleh pengurus dan anggota di tingkat Balai Perempuan dan Cabang sangat beragam dan inspiratif. Namun kekayaan pengalaman ini belum terdokumentasikan dan terdistribusikan di berbagai struktur organisasi Koalisi Perempuan Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas organisasi diukur dari: 1. Tata kelola Keuangan dan asset organisasi, sesuai standard yang berlaku 2. Tata kelola kelembagaan yang baik, 3. Laporan (dalam bentuk fisik dan soft file) harus disampaikan setiap bulan, dan 4. Diselenggarakannya Audit Lapangan paska kegiatan. Dengan standard baru ini, maka seluruh sistem dan mekanisme organisasi harus berjalan dengan baik, seperti fungsi pengurus, mekanisme koordinasi dan administrasi organisasi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah mendorong terciptanya satu system standard di tingkat sekretariat wilayah dan cabang.

2. Kekuatan dan Kelemahan Organisasi

Kekuatan Koalisi Perempuan Indonesia adalah :

1. Memiliki struktur organisasi hingga tingkat desa dengan jumlah yang besar
2. Memiliki Kelengkapan peraturan organisasi AD/ART, SOP (SOP Ketenagakerjaan dan SOP Keuangan, Payroll sistem, Peraturan Organisasi (kebijakan penggalangan dana, penyelesaian Konflik, Perlindungan Anak, perjalanan dinas). Kecuali 1 peraturan yang belum ada yaitu: Sistem Informasi Publik.
3. Memiliki struktur organisasi dan struktur sekretariat
4. Memiliki Staff dengan kejelasan Fungsi dan Peran masing-masing posisi dalam struktur sekretariat nasional (Kepersonalian)
5. Memiliki Sistem Akuntansi berbasis Komputer (Accurate System)

Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staff yang kurang (terbatas)
 - a. Satu staff bertanggung jawab pada satu donor, (bekerja dari perencanaan-implementasi –hingga pelaporan), mendukung project lain dan melaksanakan program reguler.
 - b. Kurangnya jumlah staff berpengaruh pada intensitas advokasi
 - c. Kurangnya staff berpengaruh pada dinamika & suasana di lingkungan sekretariat
 - d. Telah diatasi dengan cara merekrut staff, namun terbentur pada ketahanan staff baru (dari 5 staff yang direkrut 1. staff Keuangan, 2 orang asisten proyek dan 1 staff pokja) hanya 2 yang bertahan yaitu staff keuangan dan staff PO.

2. Sumber daya di tingkat wilayah untuk memenuhi standard pendukung dana :

- a. Dibutuhkan staff khusus keuangan
- b. Dibutuhkan pemerataan sumber daya di seluruh wilayah hingga Balai Perempuan untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan organisasi